



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

2023

INTEGRITAS PEGAWAI  
KEPERCAYAAN PUBLIK

# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERKEBUNAN



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

2023



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERKEBUNAN





## KATA PENGANTAR

**Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc**

*Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan*

**S**ekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja (LAKIN) sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang progress capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Lebih lanjut, melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk meningkatkan kinerja. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat

yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perkebunan,

Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc

# RINGKASAN EKSEKUTIF



Dalam rangka mewujudkan visi misi Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Renstra tersebut memuat empat tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu 1) Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien. 2) Terselenggaranya

pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. 3) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. dan 4) Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

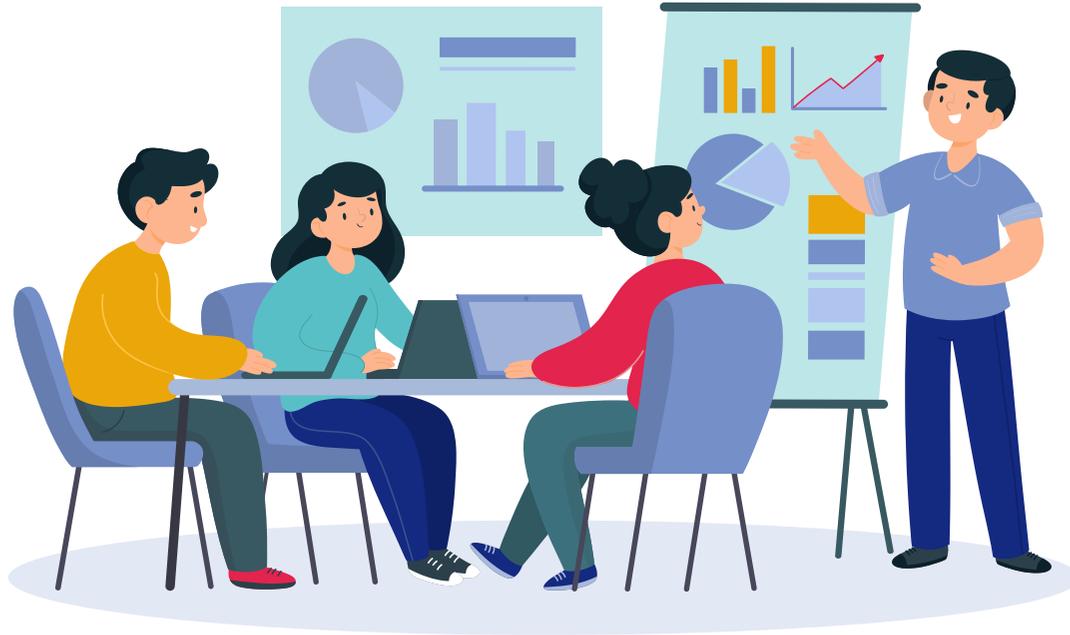
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2023. Adapun dari keenam Indikator tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target seluruh indikator Tahun 2023. Dengan kata lain, seluruh capaian Indikator berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi target. Capaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00 (target 32,75). Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan sebesar 3,20 (target 3,00). Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan sebesar 3,914 (target

3,00). Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan sebesar 90,32% (target 85,00%). Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebesar 94,74% (target 90,00%) dan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu 90,75 (target 85,00).

Pada sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah merealisasikan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 97,02%, yaitu Rp 133,93 M dari total pagu sebesar Rp 138,03 M. Sedangkan realisasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 97,17%, yaitu Rp 181,58 M dari total pagu sebesar Rp 186,88 M. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk

melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penguatan pendampingan program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Perkebunan, dan koordinasi lintas program yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.



# DAFTAR ISI

## 01 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG	2
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
SISTEMATIKA LAPORAN	7



## 02 PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS	10
PERJANJIAN KINERJA	12



CAPAIAN KINERJA 18

REALISASI ANGGARAN 50



CATATAN PENUTUP 56

LAMPIRAN 59

KALEIDOSKOP 95

# 03 AKUNTABILITAS KINERJA

# 04 PENUTUP



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	<b>12</b>	<b>Tabel 3.8</b>	Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Tahun 2019 – 2023	<b>28</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2023	<b>13</b>	<b>Tabel 3.9</b>	Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan dibandingkan Target Renstra	<b>28</b>
<b>Tabel 2.3</b>	Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	<b>14</b>	<b>Tabel 3.10</b>	Capaian IKU Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tabel 3. 11 Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	<b>31</b>
<b>Tabel 2.4</b>	Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024	<b>16</b>	<b>Tabel 3.11</b>	Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	<b>31</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	<b>18</b>	<b>Tabel 3.12</b>	Skor Komponen Penilaian Maturitas SPIP	<b>35</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	<b>19</b>	<b>Tabel 3.13</b>	Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2021 - 2023	<b>35</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	<b>21</b>	<b>Tabel 3.14</b>	Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra	<b>36</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	<b>24</b>	<b>Tabel 3.15</b>	Capaian IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	<b>37</b>
<b>Tabel 3.5</b>	Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB Tahun 2022	<b>25</b>			
<b>Tabel 3.6</b>	Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017-2022	<b>26</b>			
<b>Tabel 3.7</b>	Inovasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 - 2022	<b>26</b>			

<b>Tabel 3.16</b> Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan Tahun 2018 - 2023	<b>38</b>	<b>Tabel 3.22</b> Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	<b>45</b>
<b>Tabel 3.17</b> Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra	<b>39</b>	<b>Tabel 3.23</b> Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2023	<b>45</b>
<b>Tabel 3.18</b> Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.	<b>40</b>	<b>Tabel 3.24</b> Nilai Kinerja Anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	<b>46</b>
<b>Tabel 3.19</b> Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2018 - 2023	<b>40</b>	<b>Tabel 3.25</b> Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	<b>48</b>
<b>Tabel 3.20</b> Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Target Renstra	<b>41</b>	<b>Tabel 3.26</b> Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Rincian <i>Output</i>	<b>52</b>
<b>Tabel 3.21</b> Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	<b>42</b>		



# DAFTAR GAMBAR

---

<b>Gambar 1.1</b>	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	<b>4</b>
<b>Gambar 1.2</b>	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	<b>5</b>
<b>Gambar 1.3</b>	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	<b>6</b>
<b>Gambar 3.1</b>	Bobot Penilaian Komponen Nilai Kinerja Anggaran	<b>44</b>
<b>Gambar 3.2</b>	Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	<b>44</b>
<b>Gambar 3.3</b>	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	<b>46</b>
<b>Gambar 3.4</b>	Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)	<b>50</b>
<b>Gambar 3.5</b>	Tren Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam persentase)	<b>51</b>

KEMENTERIAN PERTANIAN

PERKEBUNAN

Berkah • Berprestasi • Berkeadilan

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN





# 01

## PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

SISTEMATIKA LAPORAN

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan antara lain memiliki sasaran: (1) meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja; (4) meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; (5) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan (6) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan senantiasa melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung dengan efektif, efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sekaligus memberikan gambaran capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam

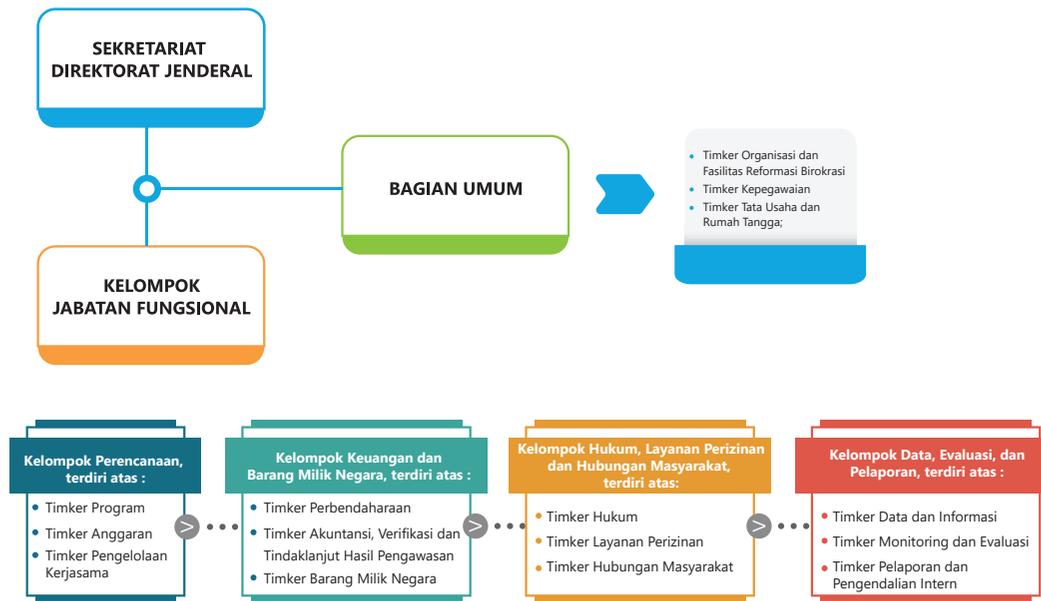
rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi

perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



# TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI



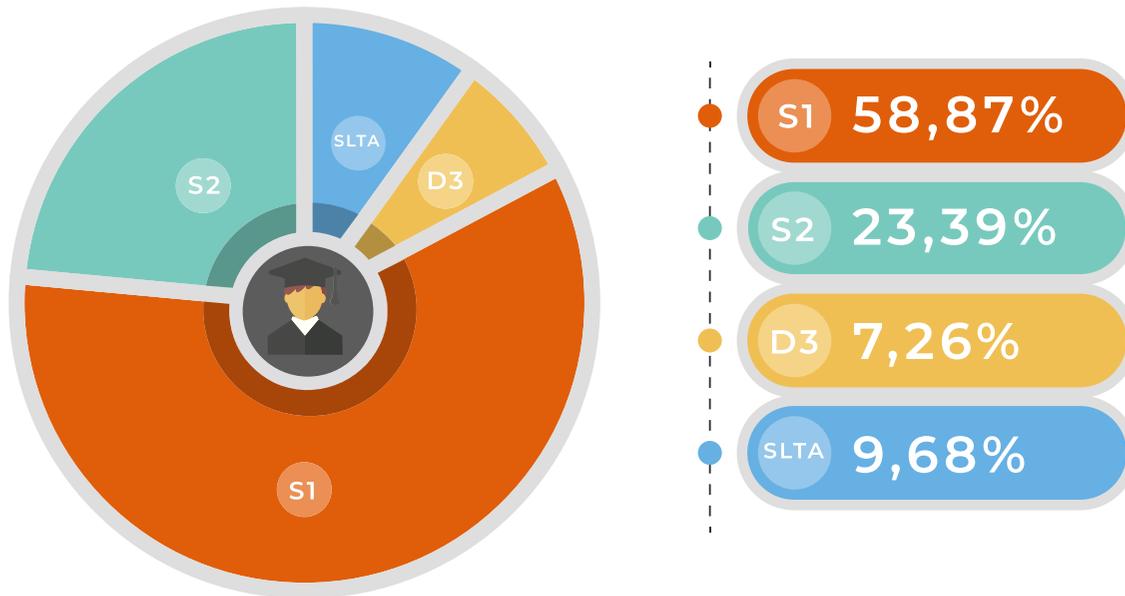
**Gambar 1.1** Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

*Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278 Tahun 2023 KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan nomor 130/KPTS/OT.050/10/2023 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan.
- b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-



**Gambar 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

*Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023*

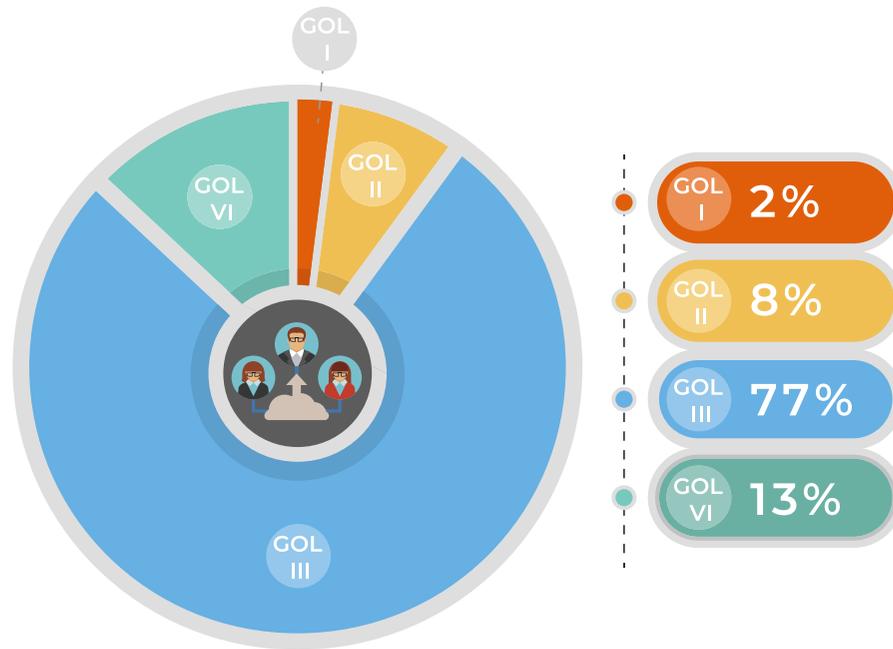
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk kelompok-kelompok jabatan fungsional yang disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan terfokus. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 1 bagian umum yang dikepalai oleh seorang Kepala Bagian dan 4 kelompok substansi, yang

setiap kelompok dikepalai oleh seorang Ketua Kelompok.

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas,



**Gambar 1.3** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

*Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023*

moralitas, profesionalitas, dan kesejahteraan. Secara umum, jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan per 31 Desember 2023 adalah 124 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 55 orang (44,35%) dan 69 orang (55,64%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2023 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi

yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Komposisi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menurut tingkat Pendidikan terakhirnya (Gambar 1.2), menunjukkan sebagian besar atau 58,87% pegawai memiliki Pendidikan terakhir strata 1 (SI) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 23,39% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (7,26%), dan SMA (9,68%).

Gambaran pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan golongan seperti tampak pada gambar 1.3, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 77,41% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, sebanyak 8,06% pegawai dengan golongan II, pegawai dengan golongan IV sebanyak 12,90% dan sisanya sebanyak 1,61% adalah pegawai PPPK dengan golongan VII dan IX.

# SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## 1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi pada tahun 2023.

## 2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai rencana strategis, dilanjutkan dengan penjelasan perjanjian kinerja tahun 2023.

## 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

### a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2023.

### b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran tahun 2023 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

## 4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan kinerjanya.

## 5) Lampiran

Lampiran LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, Data Dukung untuk Menunjang Hasil Pengukuran IKK, dan Dokumentasi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.





02

# PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023, Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kegiatan. Penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

Melalui identifikasi berbagai potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi organisasi di masa mendatang, telah disusun visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Visi tersebut

disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dan dapat menggambarkan organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perkebunan **“Perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya visi Presiden Republik Indonesia”**, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan visi, yaitu:

**“Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu:

- (1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana program, anggaran dan kerja sama di bidang perkebunan.
- (2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan.
- (3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta

laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan.

- (5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi perkantoran.

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggung jawab secara berkelanjutan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menopang fungsi tersebut dengan semangat reformasi

birokrasi untuk senantiasa melakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian, dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* dalam memetakan strategi, target, dan penilaian pencapaian kinerja telah diimplementasikan.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, ditetapkan tujuan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, yaitu:

- (1) Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien.
- (2) Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.
- (3) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (4) Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan.



# PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja berpedoman pada visi dan misi, Renstra, Renja dan

peraturan terkait pengelolaan kinerja. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang berkualitas. Penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan tahun 2023 dalam wujud Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan, dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran dan dirinci ke dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.** Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai
		Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)
		Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3.00 Level
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	85.00%
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90.00%

## Lanjutan Tabel 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2.	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

**Sumber:** Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, dalam upaya mencapai 2 (dua) sasaran strategis tersebut, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan didukung pendanaan da-lam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan sebesar Rp. 138.034.944.000 yang dibagi ke dalam 4

Klasifikasi Rincian *Output* Program dan 14 Rincian *Output* Program sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2** Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	138.034.944.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	138.034.944.000
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	77.015.977.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	6.150.000.000
1780.EBA.957	Layanan Hukum	4.060.000.000
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.300.000.000
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	570.676.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	17.590.728.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.953.554.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	39.391.019.000
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.977.874.000
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.511.753.000
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	466.121.000
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.312.595.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.312.595.000
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	56.728.498.000
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	42.769.798.000

## Lanjutan Tabel 2.2

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.300.000.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7.950.000.000
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	708.700.000

**Sumber:** SAKTI Kementerian Keuangan

Perbandingan IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3** Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKK 2019	Target	IKK 2020	Target	IKK 2021	Target	IKK 2022	Target	IKK 2023	Target
-	-	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.58 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.62 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.72 Nilai
Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,62	3.00 Skala Likert 1-5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3.00 Nilai IKM (skala likert)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)
Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72	-	-	-	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3.00 Level	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3.00 Level
Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75	95.00%	-	-	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	75.00%	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80.00%

Lanjutan Tabel 2.3

IKK 2019	Target	IKK 2020	Target	IKK 2021	Target	IKK 2022	Target	IKK 2023	Target
Nilai	95.00%	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	95.00%	-	-	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	80.00%	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85.00%
Tingkat Kepuasan unit kerja lain di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga)	92.00%	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Target IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4** Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.58 Nilai	32.62 Nilai	32.72 Nilai	32.75 Nilai	32.91 Nilai
	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	-	3 Level	3 Level	3 Level	4 Level
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	-	75%	80%	85%	85%
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	-	80%	85%	90%	90%
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai

**Sumber:** Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

**03**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

# CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan selama tahun 2023 diperoleh dengan cara menghitung realisasi tiap-tiap Indikator Kinerja Kegiatan pada perjanjian kinerja dibandingkan dengan target. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKK memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target

Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan. Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 dengan kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023, penetapan kategori capaian kinerja digunakan metode *scoring* dengan

mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian > 100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-79%), dan
4. Kurang berhasil (capaian < 60%).

Keberhasilan pencapaian sasaran program Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditopang oleh 6 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai	35,00*	106,87%	Sangat Berhasil
		Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)	3,20	106,67%	Sangat Berhasil
		Level maturitas penyelenggaraan SPII Ditjen Perkebunan	3.00 Level	3,914	130,47%	Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	85.00%	90,32%	106,26%	Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90.00%	94,74%	105,26%	Sangat Berhasil

### Lanjutan Tabel 3.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2.	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai	90,75	106,76%	Sangat Berhasil

\*) Realisasi Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 merupakan nilai tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan evaluasi PMPRB pada tahun 2023 dihentikan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, selama tahun 2023, dari 6 (enam) IKK yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, seluruhnya melebihi target. Adapun penjelasan detail mengenai capaian Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Tujuan reformasi birokrasi adalah membentuk organisasi yang agile, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang

telah ditetapkan secara optimal. Dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut untuk senantiasa berinovasi meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menempatkan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien sebagai salah satu sasaran yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Sasaran ini diturunkan ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja. Ringkasan capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien pada tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.2

**Tabel 3.2** Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai	35,00	106,87%	Sangat Berhasil
Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)	3,20	106,67%	Sangat Berhasil
Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3.00 Level	3,914	130,47%	Sangat Berhasil

**Lanjutan Tabel 3.2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80.00%	90,32%	106,26%	Sangat Berhasil
Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85.00%	94,74%	105,26%	Sangat Berhasil

**Sumber :** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

### a. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Pada tahun 2023, dilakukan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi. Sebelumnya berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020, berfokus pada aspek hulu (proses dan kepatuhan tata kelola internal birokrasi) dan cenderung administratif, mulai tahun 2023 berfokus pada aspek hilir (hasil dan dampak kinerja untuk menyelesaikan problem rakyat) dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Evaluasi RB tahun 2023 dilakukan dengan menghitung 26 (dua puluh enam) indikator dampak diantaranya kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi. Evaluasi ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen.

Untuk itu dengan adanya perubahan ini maka KemenPANRB telah bersurat kepada seluruh K/L dan Pemda melalui surat nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023, untuk menghentikan kegiatan pengisian PMPRB. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian kemudian bersurat kepada seluruh eselon I melalui surat Nomor B-177/OT.240/A2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian bahwa kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan. Mekanisme evaluasi RB tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai pedoman baru untuk evaluasi Reformasi Birokrasi 2023.

Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Fokus evaluasi RB 2023 terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General akan menilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal instansi pemerintah. Sementara RB tematik akan menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat, dalam upaya percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah. Proses evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal melalui konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (*reliability*) dan kebenaran (*validity*) dokumen (*evidence*) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan tagging dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Perkebunan turut serta dalam upaya pelaksanaan RB dengan tema pengentasan kemiskinan dengan kegiatan:

1) *Nursery*

*Nursery* merupakan dukungan secara tidak langsung pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem

dengan hasil dari *Nursery* yang dapat dibagikan pada petani miskin sehingga termasuk dalam strategi peningkatan akses terhadap pekerjaan atau pendapatan.

2) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan

Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dikategorikan sebagai strategi peningkatan akses

terhadap pekerjaan atau pendapatan dan peningkatan kapasitas SDM karena dalam kegiatan ini terdapat pelatihan petani dan upah pengamatan, pembuatan Metabolit Sekunder Agens Pengendali Hayati (MS APH), pembuatan kompos, bahan pengendali OPT (pestisida nabati) dan pengendalian OPT.

Capaian pelaksanaan rencana aksi RB Tematik 2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3** Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
<i>Nursery</i>	14 unit	19.689.630.000	14 unit	92,89	18.290.071.814	
<b>Pembangunan <i>Nursery</i></b>	<b>2 unit</b>	<b>1.713.900.000</b>	<b>2 unit</b>	<b>94,20</b>	<b>1.614.557.361</b>	
BBPPTP Medan	0	0	0	0	0	Target semula 2 unit <i>Nursery</i> , dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Ambon	0	0	0	0	0	Target semula 1 unit <i>Nursery</i> , dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Surabaya	2 unit	1.713.900.000	2	94,20	1.614.557.361	Ada perubahan target fisik dari 4 unit menjadi 2 unit, karena terdapat perubahan prioritas kegiatan

Lanjutan Tabel 3.3

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
Pusat (Direktorat Perbenihan Perkebunan)	0	0	0	0	0	
<b>Operasional Nursery</b>	<b>12 unit</b>	<b>17.975.730.000</b>	<b>12 Unit</b>	<b>92,77</b>	<b>16.675.514.453</b>	
BBPPTP Medan	2 unit	1.332.588.000	2 unit	96,89	1.291.102.551	Jumlah Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 KT sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000
BBPPTP Ambon	4 unit	2.404.800.000	4 unit	98,09	2.358.880.526	Jumlah Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo, yang disalurkan ke 86 KT sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500
BBPPTP Surabaya	6 unit	14.238.342.000	6 unit	91,48	13.025.531.376	Jumlah Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini S795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 KT sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1, senilai Rp 5.103.156.000
<b>Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan</b>	<b>3.325 Ha</b>	<b>19.936.141.000</b>	<b>3.325 Ha</b>	<b>99,17</b>	<b>19.770.584.946</b>	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Hasil evaluasi internal RB yang telah dilakukan revidi bersama Tim Inspektorat III Kementerian Pertanian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Capaian rencana aksi Tahun 2023 untuk 2 kegiatan (*Nursery* dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan) adalah sebesar 100%.
- 2) Capaian rencana aksi kegiatan *Nursery* sebesar 100% yaitu dari target sebanyak 14 unit telah terealisasi sebanyak 14 unit, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.152.199.227 dari pagu anggaran Rp 18.892.380.000 (90,79%). Dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan target yang semula 20 unit menjadi 14 unit dengan anggaran sebesar Rp 18.892.380.000 dari anggaran semula Rp 31.151.766.000, untuk pembangunan *Nursery* yang semula dialokasikan 8 unit yaitu di Kabupaten Pesawaran; BSIP Lampung; Provinsi Sulawesi Barat; Kab Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Aceh; Provinsi Kalimantan Barat; BSIP Tanaman Palma Sulawesi Utara; dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya rencana pembangunan di 7 lokasi tidak dilaksanakan sehingga hanya terealisasi 1 unit di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dan anggarannya dialihkan ke kegiatan prioritas lain.

3) Pelaksanaan pembangunan *Nursery* di 7 (tujuh) lokasi tidak jadi dilaksanakan, hal ini disebabkan terjadinya perubahan fokus kegiatan yaitu dialihkan pada mengoptimalkan perbanyak benih pada *Nursery* yang telah dibangun terlebih dulu senilai Rp 9.367.150.000. Pelaksanaan pembangunan *Nursery* di 7 lokasi tidak jadi dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu:

- a) Keterbatasan waktu pelaksanaan, mengingat untuk membangun *Nursery* diperlukan kesiapan teknis maupun administrasi
  - b) Pembangunan *Nursery* baru, dinilai kurang efektif dalam mencapai target penyediaan benih komoditas perkebunan, dengan banyaknya *Nursery* kapasitas kecil, mengakibatkan operasional di masing-masing *Nursery* menjadi besar, oleh karena itu dinilai lebih efektif dengan mengoptimalkan *Nursery* yang sudah dibangun sebelumnya terutama *Nursery* dengan kapasitas besar seperti *Nursery* di Kabupaten Batang, *Nursery modern* di Kabupaten Cianjur, dan *Nursery* lain yang telah dibangun.
- 4) Penurunan *output* pembangunan *Nursery* ini tidak mengganggu proses pencapaian target prioritas

nasional, namun sebaliknya dapat mempercepat produksi benih pada tahun 2023. Apabila konsep sebelumnya membangun *Nursery* di 7 lokasi maka produksi benihnya baru akan tercapai pada tahun 2024. Terdapat penambahan 1 unit *Nursery* di satker Direktorat Jenderal Perkebunan (pusat) untuk mendukung kegiatan operasional *Nursery output* Prioritas Nasional.

5) Capaian *outcome* dari kegiatan *Nursery* yaitu telah menghasilkan:

- a) Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 kelompok tani sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000
- b) Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo yang telah disalurkan ke 86 kelompok tani sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500
- c) Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini 2795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 kelompok tani sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1 senilai Rp 5.103.156.000

Kegiatan *Nursery* telah dapat mengurangi pengeluaran petani untuk pembelian sarana produksi berupa benih pada 272 kelompok tani dengan nilai seluruhnya Rp 8.177.055.500.

- 6) Capaian Rencana Aksi Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan terealisasi 100% yaitu dari target pengendalian OPT seluas 3.325 hektar dengan realisasi seluas 3.325 hektar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.770.584.946 dari pagu anggaran sebesar Rp 19.936.141.000 (99,17%).
- 7) Capaian *outcome* dari Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan telah menghasilkan taksasi kehilangan hasil akibat OPT utama pada komoditas pala, cengkeh, lada,

kopi, kakao, karet, tebu, kelapa (3.325 hektar) sebesar 906,28 ton, dengan nilai kerugian hasil yang diselamatkan senilai Rp 21.180.155.377.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun laporan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen Perkebunan TA 2023 pada kegiatan Nursery dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

- 2) Melakukan monitoring secara berkala capaian Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2024 dan menyusun laporan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen Perkebunan secara periodik (per triwulan) dengan menyajikan analisis dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Perubahan evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023, menyebabkan capaian nilai PMPRB tahun 2023 tidak dapat diketahui nilainya, sehingga realisasi indikator kinerja menggunakan data Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022. Capaian kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan disajikan pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4** Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

IK 3-1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan							
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
32,58	32,62	35,00	32,75	35,00	106,87%	32,91	106,35%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**IKHTISAR  
KINERJA**  
Capaian Nilai PMPRB  
Direktorat Jenderal  
Perkebunan



Kegiatan evaluasi RB di tahun 2022 dilakukan dengan Penilaian Mandiri (*self Assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 16 adalah sebesar 106,87% dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00 dan capaian

kinerja sebesar 106,87% dari target 32,75 dan termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Realisasi kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020, Peningkatan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 106,35% dari target akhir renstra sebesar 32,91. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Hasil evaluasi Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tertuang pada Tabel 3.5

**Tabel 3.5** Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB Tahun 2022

No.	Nama Layanan	Bobot	Nilai
<b>A.</b>	<b>Pengungkit</b>		<b>35,00</b>
I.	Pemenuhan		14,00
	1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00
	2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
	4. Penataan Tata Laksana	1,00	1,00
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
	6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25
	7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40
II.	Reform		21,00
	1. Manajemen Perubahan	3,00	3,00
	2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
	4. Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75

**Lanjutan Tabel 3.5**

No.	Nama Layanan	Bobot	Nilai
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,30
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Untuk memberikan gambaran terkait perkembangan pelaksanaan reformasi Birokrasi Nasional, berikut praktik baik reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan:

- 1) Inovasi/kegiatan yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi pelayanan Publik (KIPP) dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 3.6
- 2) Inovasi/kegiatan yang ditetapkan sebagai program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 sebagaimana Tabel 3.7

#### **Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai PMPRB Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan**

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya target indikator Nilai PMPRB adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim

reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta menindaklanjuti hasil evaluasi

- 2) Penataan dan Penguatan Organisasi di Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan melalui penyusunan proses bisnis, peta lintas fungsi dan evaluasi organisasi dengan pembahasan dan penataan organisasi tata kerja sampai dengan UPT, berdasarkan RPJMN, Renstra dan rencana kerja organisasi
- 3) Penyusunan SOP baru serta penyesuaian dan penyempurnaan SOP

**Tabel 3.6** Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Inovasi
1.	2017	Mobil SIANI (Sahabat Setia Petani)
2.	2019	Pemanfaatan Burung Tyo Alba untuk mengendalikan hama tikus pada tanaman kelapa sawit
3.	2019	Pendampingan penerapan sistem pertanian organik komoditas perkebunan
4.	2021	Si Ben Mepet Ima (Proteksi Benih Mendorong Petani Maju)
5.	2023	Rumah Pintar Pekebun

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**Tabel 3.7** Inovasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 - 2022

No	Tahun	Quickwins
1.	2022	Layanan Rumah Pintar Pekebun (Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak)

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

- 4) Penataan Analisis Jabatan telah dilakukan penyesuaian informasi jabatan dan rancangan peta jabatan di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

**Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan**

Permasalahan dalam pencapaian target indikator Nilai PMPRB meliputi :

- 1) Perubahan dalam penilaian nilai PMPRB yang tidak ditindaklanjuti secara operasional pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengukuran atas nilai Reformasi Birokrasi (RB) untuk kegiatan tematik dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem masih belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan tagging pada rincian output (RO) yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan pada tahun berjalan (2023).

**Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Target Indikator PMPRB**

- 1) Indikator pengukuran RB diharapkan dapat segera dilakukan penyusunan di tingkat Kementerian Pertanian agar dapat segera dilakukan persiapan dan pengukuran mulai awal tahun 2024.
- 2) *Assessment* terhadap rincian output (RO) yang mendukung

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem diharapkan lebih detail terkait proses bisnis pelaksanaan kegiatan, output dan dampak dari kegiatan tersebut agar selaras sesuai dengan tugas Menteri Pertanian.

**b. Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU ini menjadi dasar program pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka melakukan monitoring pelayanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan survei kepuasan pengguna layanan dengan ruang lingkup survei adalah pengguna layanan dengan 2 (dua) variabel pengukuran, yaitu kepentingan dan kepuasan yang kemudian diterjemahkan dalam aspek-aspek layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Survei ini dilakukan untuk memperoleh *feedback* dari pegawai atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan untuk perbaikan layanan berikutnya. Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang dapat memuaskan para pengguna layanan dan sebagai bentuk *continuous improvement*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memasukkan IKK ini sebagai salah satu indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator sebagai berikut :

1. Penilaian IKM di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diperoleh dari nilai IKM tahun 2023.
2. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pelayanan internal perkantoran pada Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Tanggapan pada Kualitas Layanan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki rata-rata nilai sebesar 76,55% dengan rata-rata kategori sangat tinggi, artinya Kualitas Layanan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangat memuaskan pelanggan internalnya.

- b. Tanggapan Responden pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang meliputi:
- Layanan Dukungan Manajemen Internal.
  - Layanan Sarana dan Prasarana Internal.
  - Layanan Manajemen SDM Internal.
  - Layanan Manajemen Kinerja Internal.
  - memiliki rata-rata nilai sebesar 76,68% dengan rata-rata kategori sangat tinggi, artinya keempat unit layanan internal Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangat memuaskan pelanggan internalnya.
- c. Tanggapan Responden pada Kepuasan Pelanggan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki rata-rata nilai sebesar 75,43% dengan rata-rata kategori tinggi, artinya pelanggan internal Ditjenbun merasa puas terhadap layanan internal Ditjenbun.
- d. Dari 156 pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan yang menjadi responden, sebanyak 87,8% responden merasa puas dengan kondisi lingkungan kerja saat ini, sedangkan 12,2% responden lainnya merasa tidak puas.
- e. Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan internal perkantoran di Ditjen. Perkebunan menunjukkan kinerja pelayanan internal perkantoran yang baik dengan capaian realisasi 3,20 dari target 3 skala likert, meningkat 0,7 poin atau 2,34% dari tahun sebelumnya sebesar 3,13. Hasil ini diharapkan akan memberikan informasi yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja aspek-aspek layanan yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja layanan internal perkantoran di Ditjen. Perkebunan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terarah.

**Tabel 3.8** Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	3,7 Skala likert 1-5	-	3,00 Skala likert 1-4	3,00 Skala likert 1-4	3,00 Skala likert 1-4
Realisasi	3,6	-	3,18	3,13	3,20
Capaian	97,30%	-	106%	104,33%	106,67%

**Sumber :** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**Tabel 3.9** Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
3,00	3,20	106,67%

**Sumber :** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023



## IKHTISAR KINERJA

Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam tabel 3.8 terlihat bahwa pada tahun 2021 target IKK ini menurun, hal ini disebabkan karena terdapat perubahan skala penilaian. Tahun 2020 indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga hasil survei merupakan penilaian atas layanan Direktorat Jenderal Perkebunan dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target dan capaian pada tahun-sebelumnya maupun setelahnya. Tahun 2023 terdapat peningkatan 0,7 poin dari tahun 2022 atau sebesar 2,34%.

Nilai realisasi IKK tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan.

### Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan. Namun dalam pencapaian IKU tersebut,

masih diperlukan peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat dan/atau UPT Pusat.

### Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut:

- Secara kontinu memperbaiki layanan sesuai dengan harapan pengguna layanan sebagaimana rekomendasi atas hasil survei pada tahun-tahun sebelumnya.
  - Menetapkan kebijakan secara taktis dan strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu
  - Menyelenggarakan forum untuk menjangkau masukan dari pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - Melaksanakan proses penilaian survei dengan baik, seperti internalisasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- c. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan**

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan koordinasi oleh Inspektorat Jenderal, inisiatif kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu Internalisasi Kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern. Upaya internalisasi kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern penting dilakukan agar semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman pimpinan dan pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern. Pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan koordinasi tim SPI lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang dihadiri oleh para pimpinan unit kerja setingkat eselon III di Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan Tim Satuan Pelaksana SPI dan menghadirkan auditor Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor Inspektorat Jenderal selaku pemateri.

Alat ukur yang dipakai mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya dilakukan oleh APIP K/L, dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Ruang lingkup penilaian atas maturitas SPIP terintegrasi meliputi:

- 1) Mekanisme Penilaian, terdiri dari:
  - a) Penilaian mandiri (PM) oleh manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan dalam hal ini koordinasi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan beserta Tim Penilaian Mandiri SPIP lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dan Tim APIP Inspektorat Jenderal,
  - b) Penjaminan kualitas (PK) oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada K/L/Pemda dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- 2) Fokus Penilaian adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur-unsur:
  - a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b) Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko

di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

- c) Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
  - d) Kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dinilai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 3) Komponen Penilaian terdiri dari:
    - a) Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
    - b) Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian.
    - c) Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektifitas dan efisiensi

pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 4) Periode yang dinilai adalah sebagai berikut:
- Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan.
  - Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
  - Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Tujuan dilakukannya penilaian maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perkebunan adalah untuk mengukur

tingkat kematangan penerapan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan harapan dapat (a) memberikan perbaikan kualitas perencanaan, (b) membantu upaya mitigasi risiko fraud dan, (c) meningkatkan kualitas SPIP berkelanjutan.

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan Tim Penilaian Mandiri SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan dan penjamin kualitas

yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Teknik pengumpulan bukti meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP.

Target untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,00 dengan periode pelaporan tahunan. Realisasi capaian IKU level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan adalah sebesar 3,914 yang didapat dari hasil penjaminan kualitas (PK). Dengan demikian, capaian realisasi IKK tersebut pada tahun 2023 terhadap targetnya dapat ditunjukkan pada tabel 3.10.

**Tabel 3.10** Capaian IKU Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-3 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
3,00	3,914	130,47%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Adapun rincian penjaminan kualitas terhadap komponen, unsur dan sub unsur tertuang pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11** Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		

Lanjutan Tabel 3.11

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>		100,00%		<b>5,000</b>		
<b>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</b>			<b>40,00%</b>		<b>2,000</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,156	3,75%		0,118		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,357	3,75%		0,088		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,250	3,75%		0,084		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	3,75%		0,108		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,750	10,00%		0,275		
Analisis Risiko (2.2)	2,608	10,00%		0,261		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,250	2,27%		0,074		

Lanjutan Tabel 3.11

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,663	5,00%		0,133		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,833	7,50%		0,138		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,250	7,50%		0,169		

Lanjutan Tabel 3.11

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				<b>2,730</b>		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			<b>30,00%</b>		<b>0,819</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>						
Capaian <i>Outcome</i>	5,000	20,00%		1,000		
Capaian <i>Output</i>	5,000	10,00%		0,500		
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>						
Opini LK	4,000	25,00%		1,000		
<b>Pengamanan atas Aset</b>						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25,00%		0,750		
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	2,000	20,00%		0,400		
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>		<b>100,00%</b>		<b>3,650</b>		
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>			<b>30,00%</b>		<b>1,095</b>	
<b>MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI</b>						<b>3,914</b>

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Simpulan hasil penjaminan kualitas maturitas SPIP tahun 2023 yang telah disusun dan telah dilaporkan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebesar 3,914 yang berada pada level “**terdefinisi**”. Dengan perolehan tingkat maturitas “**terdefinisi**” maka

karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, praktik pengendalian intern telah

dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Rincian simpulan penilaian mandiri maturitas SPIP tertuang pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12** Skor Komponen Penilaian Maturitas SPIP

No	Komponen Penilaian	Level	Nilai
1.	Penetapan Tujuan	5	5,000
2.	Struktur dan Proses	3	2,730
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	3,650
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3,914</b>
	<b>-MRI</b>	<b>3</b>	<b>3,703</b>
	<b>-IEPK</b>	<b>2</b>	<b>3,596</b>

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Dengan tingkat maturitas terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Direktorat Jenderal Perkebunan telah berada pada level 3 (terdefinisi). Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan realisasi tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.13.

**Tabel 3.13** Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2021 - 2023

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	3,00	3,00	3,00
Realisasi	3,65	3,774	3,914
Capaian	121,67%	125,80%	130,47%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023



**Tabel 3.14** Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
3,00	3,914	130,47%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Realisasi IKK tersebut pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Mengingat IKK tersebut baru diterapkan untuk tahun 2021, sementara pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d. 2020 tidak ditargetkan, sehingga perbandingan capaian IKK tersebut dengan tahun 2018 s.d. 2020 tidak dapat dilakukan. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian tahun 2023 adalah 2,994 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (berkembang). Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Ditjen Perkebunan yang memiliki nilai 3,914 jika dibandingkan dengan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian lebih besar 0,92 poin.

Nilai realisasi IKK tersebut belum melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan, dalam rangka mencapai target akhir renstra.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKK tersebut adalah melakukan monitoring dan asistensi secara aktif terhadap perkembangan penyusunan laporan dan dokumen pendukung sesuai kriteria penilaian.

#### **Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan. Namun dalam pencapaian IKU tersebut, masih diperlukan peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat dan/atau UPT Pusat.

#### **Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja**

Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan, dalam rangka mencapai

target akhir renstra. Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKK tersebut adalah melakukan monitoring dan asistensi secara aktif terhadap perkembangan penyusunan laporan dan dokumen pendukung sesuai kriteria penilaian.

#### **d. Persentase rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.**

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus disusun secara

profesional dan *modern*. Pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi LHP BPK.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Pengguna Anggaran diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TLHP BPK tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan

kepada BPK. Selanjutnya BPK melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut.

IKK ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindaklanjuti yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sesuai ketentuan, BPK akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi BPK yang belum selesai. Pemerintah tetap wajib melanjutkan penyelesaian tindak lanjut, baik atas rekomendasi BPK yang belum selesai, maupun atas rekomendasi yang belum disampaikan dalam LHP.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi didefinisikan sebagai temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Pengukuran IKK tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan. Target IKK tersebut untuk tahun 2023 adalah 85%. Target tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80% sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.15

**Tabel 3.15** Capaian IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-4 Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
85,00%	90,32%	106,26%

**Sumber :** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023



**Tabel 3.16** Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan Tahun 2018 - 2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	95%	95,90%	-	75%	80%	85%
Realisasi	94,44%	95,65%	-	77,14%	87,50%	90,32%
Capaian	99,41%	100,68%	-	102,85%	109,38%	106,26%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Realisasi IKK adalah sebesar 90,32% (melampaui target 85,00%) sehingga capaiannya sebesar 106,26%. Dari 31 rekomendasi (hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2023) yang harus diselesaikan tindaklanjutnya, 28 rekomendasi telah dinyatakan selesai pada pembahasan tindak lanjut

rekomendasi dengan BPK. Perbandingan capaian dan target IKK tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Sebagaimana ditunjukkan di atas, capaian IKK tersebut terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2023, mulai tahun 2019 capaian telah konsisten melampaui target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya keras yang positif senantiasa ditunjukkan untuk penyelesaian rekomendasi BPK. Namun untuk tahun 2020, IKK ini tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, sehingga data tidak dapat disajikan.

Nilai realisasi IKK tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

### Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK pada Direktorat Jenderal Perkebunan, diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya fungsi dan peranan Tim Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan.

**Tabel 3.17** Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
85,00%	90,32%	106,26%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

2. Pejabat/Pimpinan Satker belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena tidak segera dilaksanakan pada saat hasil pemeriksaan diketahui.
3. Adanya rotasi/mutasi pegawai yang menangani LHP dan pihak-pihak terkait pemeriksaan telah pensiun/purna bakti, sakit dan meninggal dunia serta pihak ketiga/rekanan/perusahaan meninggal dunia, telah non aktif/alamat tidak diketahui lagi, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menjadi terhambat.

**Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja adalah :**

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan fungsi serta peranan APIP dan Tim SPI dalam melakukan pengendalian,

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- b. Membentuk tim penyelesaian LHP untuk mempercepat penyelesaian dan penetapan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang jelas dan terukur.
- c. Menjalin komunikasi secara intensif dengan Tim BPK untuk dan meminta arahan terhadap upaya percepatan alternatif penyelesaian rekomendasi.
- d. Menjalin komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi.

Adapun rencana aksi terkait pencapaian IKK ini di tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Segera menyelesaikan rekomendasi yang masih baru terutama rekomendasi yang bersifat administrasi.
- b. Melakukan penyetoran temuan kerugian negara dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab

Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Kesanggupan.

**c. Persentase rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan salah satunya melalui audit. Audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. Dengan dilakukannya audit dan disusunnya laporan hasil audit diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terkelolanya organisasi yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal organisasi dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

IKK ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Inspektorat Jenderal akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi yang belum selesai. Temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan hasil audit yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diaudit sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran IKK tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan. Target IKK tersebut untuk tahun 2023 adalah 90%. Target tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 85%. Capaian atas IKK dapat diketahui dari sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.18.

Realisasi IKK adalah sebesar 94,74% (melampaui target 90,00%) sehingga capaiannya sebesar 105,26%. Dari 95 rekomendasi (hasil audit sampai dengan tahun 2023) yang harus diselesaikan tindaklanjutnya, 90 rekomendasi telah dinyatakan selesai. Perbandingan capaian dan target IKK tahun-tahun

sebelumnya dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.19

Realisasi IKK tersebut tahun 2018 sampai dengan 2019 menurun, namun realisasi untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 meningkat dan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya perbaikan senantiasa ditunjukkan untuk penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal. Namun untuk tahun 2020, IKK ini tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, sehingga data tidak dapat disajikan.

Nilai realisasi IKK tersebut belum melampaui target akhir jangka

**Tabel 3.18** Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.

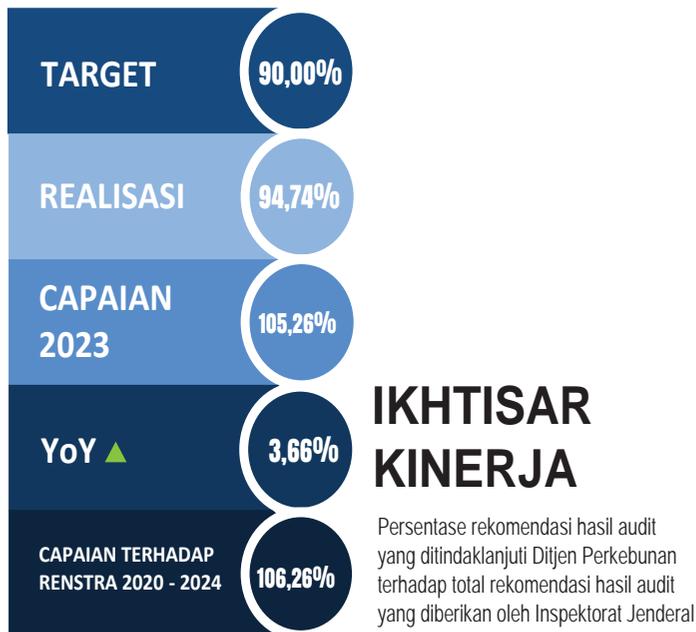
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-4 Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal		
Target	Realisasi	Capaian
90,00%	94,74%	105,26%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**Tabel 3.19** Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2018 - 2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	95,00%	95,00%	-	80,00%	85,00%	90,00%
Realisasi	94,47%	81,93%	-	82,33%	86,36%	94,74%
Capaian	99,44%	86,24%	-	102,91%	101,60%	105,26%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023



**Tabel 3.20** Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
85,00%	94,74%	111,46%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil

audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, dalam rangka mencapai target akhir renstra.

#### **Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya :

- Masih adanya beberapa temuan kerugian negara yang cukup lama khususnya temuan eks Proyek/Bagian Proyek yang sudah *closing date*/tutup, dan sulit ditindaklanjuti karena dokumen pendukung dan pihak-pihak terkait temuan tidak diketahui keberadaannya;
- Pejabat/Pimpinan Satker belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pengawasan, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena tidak segera dilaksanakan pada saat hasil pemeriksaan diketahui;
- Adanya rotasi/mutasi pegawai yang menangani LHP dan pihak-pihak terkait pemeriksaan telah pensiun/purna bakti, sakit dan meninggal dunia serta pihak ketiga/rekanan/perusahaan meninggal dunia, telah non aktif/alamat tidak diketahui lagi, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menjadi terhambat;
- Belum adanya sanksi yang tegas dari pimpinan Satker terhadap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan rekomendasi Hasil Pengawasan APiP;

**Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja**

Upaya penanganan yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya :

- a) Membentuk tim penyelesaian LHP untuk menyelesaikan dan menetapkan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan yang jelas dan terukur;
- b) Pejabat/Pimpinan Satker memberikan sanksi terhadap pelaksana kegiatan/ penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Menjalin komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan APIP.

Adapun rencana aksi terkait pencapaian IKK ini di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Menginstruksikan Satker untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit/pengawasan yang bersifat Administrasi/teknis.
- b) Melakukan penyetoran temuan kerugian negara dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Kesanggupan.

**2. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas**

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi *output*

sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKK yang mendukung pencapaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan. Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85,00 dan tercapai sebesar 90,75 pada tahun 2023.

**a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan**

Monitoring Kinerja atas Penggunaan Anggaran adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Monitoring Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan

**Tabel 3.21** Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	90,75	106,76%	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023



## IKHTISAR KINERJA

Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKAKL pada tahun anggaran berjalan sehingga capaian kinerja penggunaan anggaran pada tahun berjalan dapat ditingkatkan.

Evaluasi Kinerja anggaran adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerja penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan

kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKAKL tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKAKL serta upaya peningkatan Kinerja penggunaan anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Hasil dari monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran dimaksud ditunjukkan dalam Nilai kinerja Anggaran (NKA). Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Berdasarkan PMK No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Formula yang digunakan yaitu:

Pengelompokan hasil perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sesuai dengan PMK 22 Tahun 2021 dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

$$NK = (I \times WI) + (CH \times WCH)$$

$$\text{dimana } I = \frac{(P \times WP) + (K \times WK)}{PK \times WPK + NE \times WE}$$

- I = Nilai aspek implementasi
- WI = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- WP = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- WPK = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- WE = Bobot efisiensi
- WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I			
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot	
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%
	Efisiensi	28,6 %	Efisiensi	28,6 %		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		
	Penyerapan Anggaran	9,7 %	Penyerapan Anggaran	9,7 %		
	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program	66,67%			
Nilai Kinerja Satker		Total	Nilai Kinerja Satker Rata-Rata		50%	
			Nilai Kinerja Unit Eselon I		Total	

**Gambar 3.1** Bobot Penilaian Komponen Nilai Kinerja Anggaran

Sumber : PMK No. 22 Tahun 2021

- 1)  $NK > 90\%$  termasuk dalam kategori Sangat Baik
  - 2)  $80\% > NK \leq 90\%$  termasuk dalam kategori Baik
  - 3)  $60\% > NK \leq 80\%$  termasuk dalam kategori Cukup
  - 4)  $50\% > NK \leq 60\%$  termasuk dalam kategori Kurang
  - 5)  $NK \leq 50\%$  termasuk dalam kategori Sangat Kurang
- Outcome* (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Tabel 23 dapat dijelaskan bahwa Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dengan target 85,



**Gambar 3.2** Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Sumber : Aplikasi SMART Kemenkeu

**Tabel 3.22** Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	90,75	106,76%	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**Tabel 3.23** Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2023

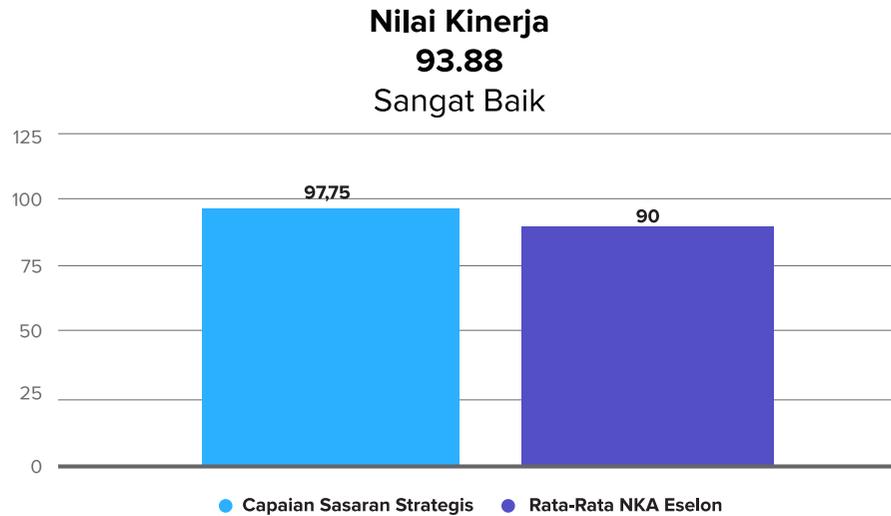
No.	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Capaian Sasaran Program	100	100	100	100
2.	Penyerapan	90,79	94,25	97,04	90,22
3.	Konsistensi	67,77	71,88	87,65	92,05
4.	Capaian Output Program	100	10,02	100	100
5.	Efisiensi	12,95	-20	-3,11	15,97
6.	Nilai Efisiensi		0	42,225	89,925
7.	Rata-rata NKA Satker	50,11	84,38	88,43	83,26
<b>NKA</b>		<b>73,09</b>	<b>79,97</b>	<b>91,04</b>	<b>90,75</b>

pada tahun 2023 terealisasi 90,75 atau capaian 106,76%. Bila didetailkan, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dibentuk oleh komponen-komponen penilaian diantaranya nilai capaian sasaran program mencapai 100, nilai penyerapan anggaran 90,22, nilai konsistensi 92,05, nilai capaian *output* program mencapai 100, Nilai Efisiensi 89,925, dan nilai rata-rata NKA satker senilai 82,55. Rekapitulasi NKA Satker seperti pada Lampiran. Berdasarkan pengelompokan kategori NKA, satker dengan kategori Sangat Baik berjumlah 10 Satker, Baik berjumlah 56 Satker, Cukup berjumlah 9 Satker,

dan Sangat Kurang berjumlah 4 satker. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 karena rendahnya nilai pada komponen penyerapan anggaran dan rata-rata NKA satker. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak terserapnya anggaran SBSN dan kurangnya kesadaran satker untuk meningkatkan nilai kinerjanya. Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 90,4 atau 106,35% dari target yang direncanakan yaitu 85. Hal ini menunjukkan target

akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Namun, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan masih di bawah rata-rata Nilai Kinerja Anggaran nasional sebesar 94,63. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan jika dibandingkan dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Gambar 13.

Berdasarkan Gambar 13, pada tingkat eselon I Kementerian Pertanian, NKA



**Gambar 3.3** Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

mencapai 93,91 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan capaian NKA Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nilai 90,75 maka sebesar 90,07. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan berhasil lebih rendah dari capaian Kementerian Pertanian, namun lebih besar dari rata-rata eselon I Kementerian Pertanian

**Tabel 3. 24.** Nilai Kinerja Anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1.	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	92,3	100	95,95	94,53	100	6,19	65,475	88,35
2.	Sekretariat Jenderal	92,05	100	99,01	92,45	99,9	0,9	52,25	89,18
3.	Badan Karantina Pertanian	91,48	100	99,27	98,08	100	0,73	51,825	87,69
4.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	91,12	100	98,78	98,92	100	4,05	60,125	86,15
5.	Ditjen Perkebunan	90,75	100	90,22	92,05	100	15,97	89,925	83,26
6.	Inspektorat Jenderal	90,72	100	97,51	93,24	100	2,86	57,15	86,01
7.	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,99	100	97,38	87	100	0,94	52,35	85,4

### Lanjutan Tabel 3.24

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
8	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,88	100	98,1	95,35	100	0,2	50,5	84,81
9	Ditjen Hortikultura	87,59	100	97,28	81,58	100	-3,92	40,2	82,08
10	Ditjen Tanaman Pangan	84,84	100	94,58	85,26	99,5	-4,21	39,475	76,59

**Sumber:** Aplikasi SMART Kemenkeu

menduduki peringkat 5 dari 10 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran seluruh Eselon I sebesar 90,07. Keberhasilan capaian NKA Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nilai 90,75 yang termasuk kategori Sangat Baik didukung oleh :

- 1) Informasi kinerja pada aplikasi SMART yang lengkap untuk sasaran dan output program sehingga dapat dilakukan pengisian realisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pencapaian sasaran dan output program yang dapat dioptimalkan pada target maksimal.
- 3) Tingkat partisipasi satuan kerja (satker) dalam melakukan pemantauan dan pengisian SAKTI yang tertib setiap bulan.

#### **Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan**

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan:

- 1) Perubahan kebijakan anggaran,

mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2023, dan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi DIPA yang berulang kali karena refocusing anggaran yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Selain itu juga revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi halaman III DIPA.

- 2) Capaian realisasi anggaran mempengaruhi nilai efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di aplikasi SMART. Dimana antara penyerapan dan efisiensi adalah hal yang kontraproduktif, penyerapan terlalu tinggi maka efisiensi akan rendah dan apabila penyerapan rendah dengan capaian output tercapai maka efisiensi akan tinggi.

- 3) Pencapaian target indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

- 4) Perubahan proses bisnis dalam

penginputan aplikasi yang semula bisa dilakukan langsung pada aplikasi SMART menjadi penginputan pada aplikasi SAKTI (modul komitmen) terlebih dahulu kemudian diteruskan ke aplikasi SMART.

Satker dapat memantau capaian masing-masing indikator pada aplikasi SMART dan satker-satker tetap diminta mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.

#### **Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan**

Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan capaian indikator kinerja ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola aplikasi SMART dalam hal terkendala masalah teknis aplikasi.

- 2) Melakukan penyusunan RPD secara

- presisi.
- 3) Monitoring ketercapaian NKA pada masing-masing satker sepanjang tahun dengan cara berkoordinasi, asistensi/melakukan pendampingan, dan berkoordinasi dengan petugas yang mengisi capaian output pada aplikasi SAKTI (modul komitmen).
  - 4) Melakukan pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala.
  - 5) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran.
  - 6) Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA.
  - 7) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang sulit direalisasikan.
  - 8) Melaksanakan rapat koordinasi hasil monev kinerja anggaran dan optimalisasi capaian kinerja tiap triwulan
  - 9) Revisi informasi kinerja pada aplikasi SMART dilakukan melalui aplikasi KRISNA, mengingat data yang digunakan pada aplikasi SMART ditarik dari aplikasi KRISNA. Perbaikan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk kemudian dilakukan perbaikan secara kolektif dengan eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian yang diajukan kepada Bappenas.
  - 10) Penyampaian peringkat capaian realisasi anggaran, NKA, dan IKPA kepada seluruh satker berikut pemberian penghargaan satker yang berprestasi.
  - 2) Melakukan himbauan secara berkala kepada seluruh satuan kerja untuk mengisi capaian output di aplikasi SAKTI sehingga data tersebut dapat terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran.
  - 3) Perlu pemantauan secara berkala terkait operator aplikasi sehingga jika ada pergantian dapat dilakukan transfer knowledge sejak awal.
  - 4) Peningkatan akurasi data capaian yang dilaporkan agar pelaporan semakin akurat dan informasi dapat diandalkan.
- Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran**
- 1) Perlu identifikasi sejak awal terkait kelengkapan informasi kinerja agar permasalahan dapat segera diatasi.
- Masing-masing satuan kerja melakukan koordinasi antara bagian evaluasi dan operator capaian *output* baik di aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART sehingga capaian *output* yang diinput pada aplikasi SAKTI telah sesuai.

**Tabel 3.25** Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Rincian Output	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>138.034.944.000</b>	<b>133.927.729.216</b>	<b>2,98</b>
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	100%	138.034.944.000	133.927.729.216	2,98
Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	77.015.977.000	73.888.746.239	4,06
Layanan BMN	100%	6.150.000.000	6.144.200.854	0,09
Layanan Hukum	100%	4.060.000.000	3.971.528.925	2,18
Layanan Hubungan Masyarakat	100%	5.300.000.000	5.258.270.648	0,79

**Lanjutan Tabel 3.25**

Rincian Output	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	570.676.000	554.392.572	2,85
Layanan Umum	100%	17.590.728.000	16.562.382.559	5,85
Layanan Data dan Informasi	100%	3.953.554.000	3.875.508.891	1,97
Layanan Perkantoran	100%	39.391.019.000	37.522.461.790	4,74
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%	1.977.874.000	1.911.117.050	3,38
Layanan Sarana Internal	100%	1.511.753.000	1.453.551.050	3,85
Layanan Prasarana Internal	100%	466.121.000	457.566.000	1,84
Layanan Manajemen SDM Internal	100%	2.312.595.000	2.294.695.525	0,77
Layanan Manajemen SDM	100%	2.312.595.000	2.294.695.525	0,77
Layanan Manajemen Kinerja Internal	100%	56.728.498.000	55.833.170.402	1,58
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	42.769.798.000	42.223.817.589	1,28
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	5.300.000.000	5.026.642.355	5,16
Layanan Manajemen Keuangan	100%	7.950.000.000	7.931.698.435	0,23
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	708.700.000	651.012.023	8,14
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>138.034.944.000</b>	<b>133.927.729.216</b>	<b>2,98</b>

**Sumber:** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

### Analisis Efisiensi atas Sumber Daya

Efisiensi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu *output* yang sama atau peningkatan capaian *output* dengan realisasi anggaran yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam PMK

Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan data pagu-realisasi dan data capaian *outputnya*, maka diperoleh hasil

persentase efisiensi belanja TA 2023 dalam rangka mendukung sasaran terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas adalah sebesar 2,98 dengan rincian perhitungan pada tabel 3. 25.

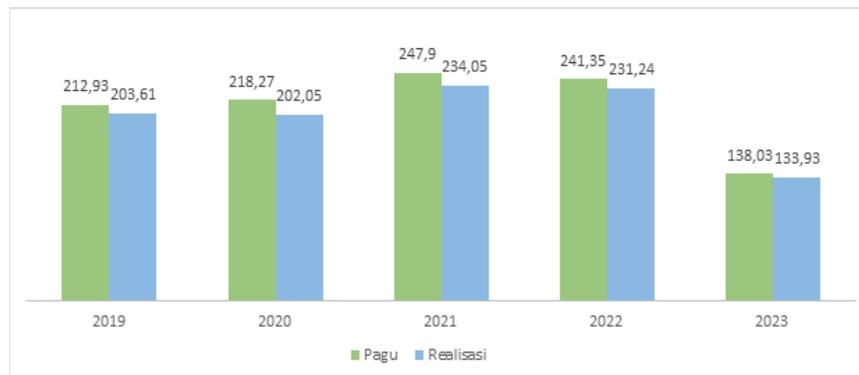
# REALISASI ANGGARAN

## 1. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2023

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan di-dukong oleh pagu anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 138.034.944.000 untuk menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

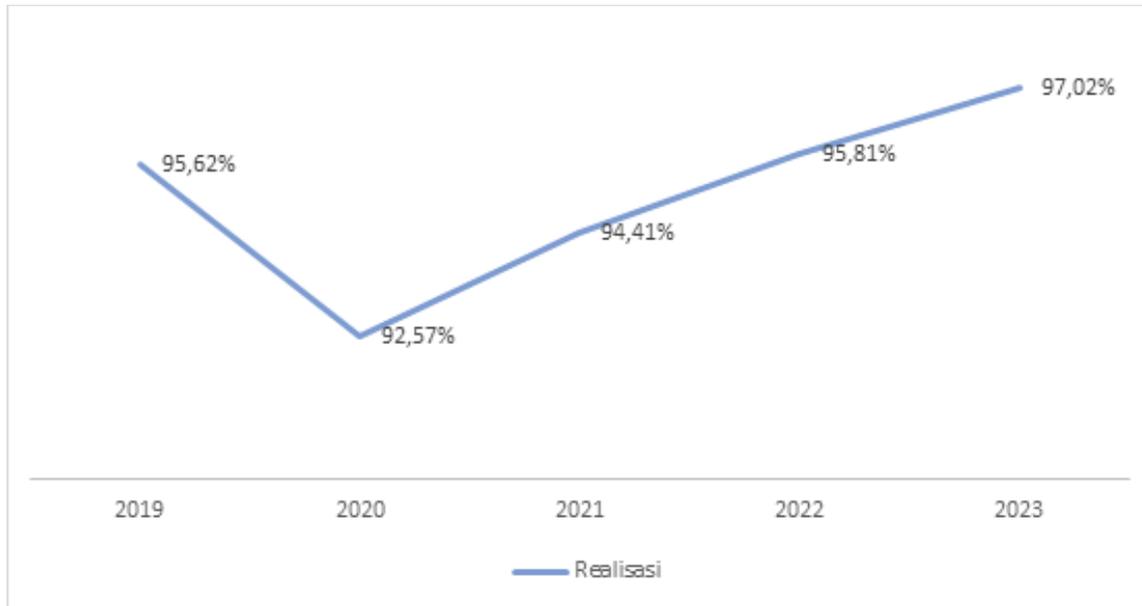
Berdasarkan data *online monitoring* SPAN (OMSPAN) Anggaran TA 2023, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Per-kebunan TA 2023 adalah sebesar Rp. 133.927.729.216 atau mencapai 97,02% dari total pagu sebesar Rp. 138.034.944.000. Penyerapan anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,21% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,81%. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2018-2023 terlihat dalam Gambar 3.4.

Dari gambar 3.5 perkembangan realisasi anggaran antara tahun 2019 sampai dengan 2023. Persentase penyerapan anggaran menurun pada tahun 2020 (92,57%.turun 3,05%), meningkat pada tahun 2021 (94,41%. naik 1,84%), meningkat lagi di tahun 2022 (95,81%. naik 1,40%), dan meningkat tahun 2023 (97,02% naik 1,21%). Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tampak fluktuatif, sedangkan persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan terus



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**Gambar 3.4** Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

**Gambar 3.5** Tren Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam persentase)

meningkat namun sempat menurun di tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan terhambat.

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2023 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- a. Melakukan reuiu DIPA yang sudah disahkan, dan segera mengajukan usulan revisi DIPA jika diperlukan.
- b. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara
- c. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
  - 1) Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa dan/atau kelompok kerja pengadaan.
  - 2) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - 3) Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

d. Jika suatu kegiatan belanja sulit dilakukan maka anggaran belanja dimaksud segera direalokasi untuk belanja lain.

e. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023 per Rincian Output

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, pada TA 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan 14 (empat belas) rincian *output*. Adapun realisasi anggaran dan fisik atas 14 (empat belas)

rincian *output* tersebut pada TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 3. 26.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.26, pagu anggaran terbesar terdapat pada rincian *output* Layanan Perkantoran. Dari 14 (empat belas) rincian *output* yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, penyerapan belanja tertinggi adalah pada Layanan BMN (99,91%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (91,86%).

**Tabel 3.26** Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Rincian *Output*

Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan				100%	138.034.944.000	133.927.729.216	97,02%
Layanan BMN	Layanan	5	5	100%	6.150.000.000	6.144.200.854	99,91%
Layanan Hukum	Layanan	2	2	100%	4.060.000.000	3.971.528.925	97,82%
Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100%	5.300.000.000	5.258.270.648	99,21%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100%	570.676.000	554.392.572	97,15%
Layanan Umum	Layanan	5	5	100%	17.590.728.000	16.562.382.559	94,15%
Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100%	3.953.554.000	3.875.508.891	98,03%
Layanan Perkantoran	Layanan	5	5	100%	39.391.019.000	37.522.461.790	95,26%
Layanan Sarana Internal	Unit	5	5	100%	1.511.753.000	1.453.551.050	96,15%
Layanan Prasarana Internal	Unit	2	2	100%	466.121.000	457.566.000	98,16%

**Lanjutan Tabel 3.26**

Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Layanan Manajemen SDM	Orang	850	850	100%	2.312.595.000	2.294.695.525	99,23%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	81	81	100%	42.769.798.000	42.223.817.589	98,72%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	100%	5.300.000.000	5.026.642.355	94,84%
Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	100%	7.950.000.000	7.931.698.435	99,77%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	100%	708.700.000	651.012.023	91,86%

**Sumber:** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023



# 04

## **PENUTUP**

CATATAN PENUTUP

LAMPIRAN

KALEIDOSKOP

# PENUTUP

**S**ekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan berbagai fungsi yang dijalankan oleh Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan, Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran yang berkaitan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, penyempurnaan organisasi dan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023. Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, di mana dari total 6 IKK, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai nilai 35,00 dari target 32,75 pada IKK Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Memperoleh nilai 3,20 skala likert (1-4) dari target 3,00 pada IKK Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan.
3. Mencapai nilai 3,914 dari target 3,00 pada IKK Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan.
4. Memperoleh realisasi 90,32% dari target 85,00% untuk IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.
5. Memperoleh realisasi 94,74% dari target 90,00% untuk IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
6. Mencapai nilai 90,75 dari target 85,00 untuk IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun

2023 merupakan hasil Evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis dan administrasi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi, serta bagi seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode mendatang. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan

kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan di tahun-tahun mendatang.

Meskipun realisasi seluruh IKK telah mencapai targetnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKK untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal. Strategi yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang diantaranya adalah:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal.
2. Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala dan terpadu, serta koordinasi antar bagian/kelompok untuk melaksanakan kegiatan,

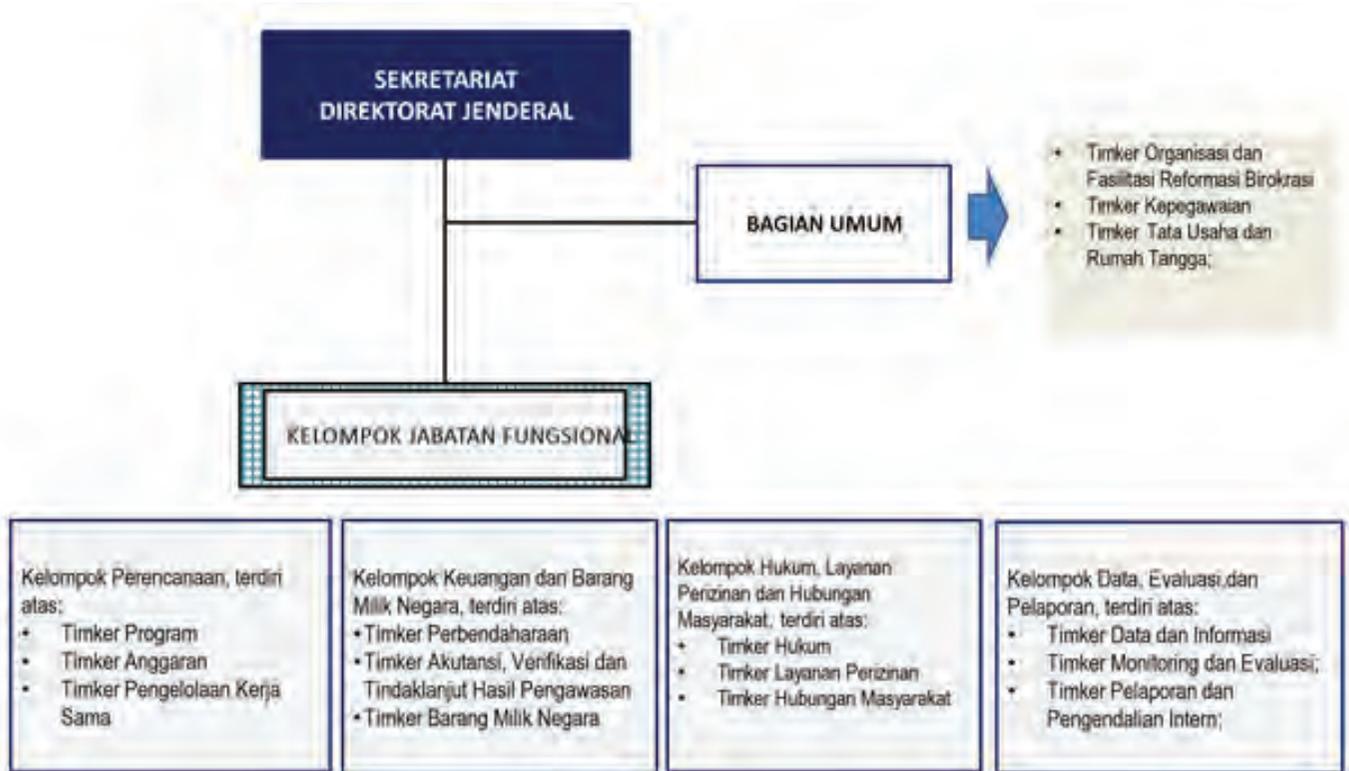
sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Membuat rencana operasional kegiatan dengan membuat skala prioritas tiap-tiap kegiatan.
4. Perencanaan kegiatan dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan jumlah anggaran yang tersedia.
5. Perlu adanya penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal.
6. Perbaiki organisasi dan SDM yang kolaboratif berbasis digital.
7. Digitalisasi layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara optimal.



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**



## LAMPIRAN 2.



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPLUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Tri Widarto

Jabatan : Sekretaris Ditjen. Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah

Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Heru Tri Widarto

LANJUTAN LAMPIRAN 2.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	1-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai
		1-2	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)
		1-3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	3.00 Level
		1-4	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	85.00 %
		1-5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90.00 %
2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

**KEGIATAN**

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

Pihak Kedua



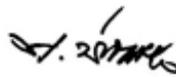
Andi Nur Alam Syah

**ANGGARAN**

Rp. 138.034.944.000

Jakarta, November 2023

Pihak Pertama



Heru Tri Widarto

### LAMPIRAN 3.



## KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550.  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B- /77 /DT.240/RB/01/2023 30 Januari 2023  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Sifat : Biasa  
Hal : Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Yth.

1. Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal; dan
3. Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi; di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, terlampir kami sampaikan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara menginformasikan dan menginstruksikan kepada para pejabat yang terkait dalam Tim Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **dihentikan** sampai pemberitahuan selanjutnya dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB;
2. Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian Pertanian dan Unit Kerja Eselon I wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya dan tetap melaksanakan implementasi reformasi birokrasi (sosialisasi, internalisasi, pelaksanaan rencana aksi, dll) di masing-masing unit kerja sebagai upaya perbaikan berkelanjutan lingkup Kementerian Pertanian;
3. Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian Pertanian dan Unit Kerja Eselon I akan melakukan penyempurnaan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 beserta *Road Map* Reformasi Birokrasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I, setelah terbitnya peraturan Menteri PAN dan RB terbaru yang mengatur tentang *road map* reformasi birokrasi nasional dan pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

### LANJUTAN LAMPIRAN 3.

- 2 -

4. Untuk memberikan gambaran kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB terkait perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat dan *stakeholders*, masing-masing Unit Kerja Eselon I menyampaikan informasi praktik baik reformasi birokrasi di unit kerja, berupa:
  - a. daftar inovasi/kegiatan yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dalam kurun waktu tahun 2018-2022;
  - b. daftar inovasi/kegiatan yang ditetapkan sebagai Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2018-2022; dan
  - c. daftar inovasi/kegiatan unggulan lain di unit kerja, yang terkait dengan salah satu atau lebih bidang tema berikut:
    - Tata Kelola Pemerintahan;
    - Penanggulangan Kemiskinan;
    - Peningkatan Realisasi Investasi;
    - Penanganan Stunting;
    - Pengendalian Inflasi; dan
    - Penggunaan Produk dalam Negeri.
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi praktik baik reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sebagaimana angka 4 (empat), sebagai berikut:
  - a. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I bertugas menghimpun data dan informasi praktik baik reformasi birokrasi dari masing-masing unit kerja terkait, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan format matriks terlampir (mohon lihat lampiran) **paling lambat pada tanggal 3 Februari 2023**;
  - b. Matriks praktik baik dalam bentuk excel dan *softcopy* dokumen penetapan, foto/video kegiatan, liputan media, laporan, publikasi/sosialisasi, infografis capaian target dan dokumen pendukung lainnya terkait informasi praktik baik, disampaikan melalui tautan berikut [bit.ly/PraktikBaikKementan2023](https://bit.ly/PraktikBaikKementan2023) sesuai dengan folder masing-masing Unit Kerja Eselon I;
  - c. Informasi praktik baik yang disampaikan, digunakan sebagai usulan untuk proses lebih lanjut melalui pembahasan bersama Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan hasilnya akan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB;
  - d. Proses pengisian data dan penyampaian informasi praktik baik lingkup Kementerian Pertanian kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB dilakukan satu pintu/terpusat oleh Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi di Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal secara *online* melalui tautan yang telah ditentukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB.

### LANJUTAN LAMPIRAN 3.

-3-

Untuk kelancaran penyampaian informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, kami mengharapkan dukungan dan komitmen dari seluruh Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,

Drs. Zulkifli, M.M  
NIP 196912021994031002

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian

## LAMPIRAN 4.



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon/Fax: (021) 7806220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112  
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

Nomor : B- 447 /RC.200/G/10 /2023 31 Oktober 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil  
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Terintegrasi pada Direktorat Jenderal  
Perkebunan Tahun 2023

Yth. Direktur Jenderal Perkebunan  
Kementerian Pertanian  
Di  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.0186/RC.200/G/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, Kami telah melaksanakan kegiatan sebagaimana pada pokok surat mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023, dengan hasil sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil Penjaminan Kualitas (PK)	Naik/Turun
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	3,953	3,914	-0,039
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,806	3,703	-0,103
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,892	3,596	-0,296

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI hasil PK sebesar 3,914 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,039 dari nilai PM sebesar 3,953.
2. Nilai MRI hasil PK sebesar 3,703 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,103 dari nilai PM sebesar 3,806.
3. Nilai IEPK hasil PK sebesar 3,596 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3 (Bekerja). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,296 dari nilai PM sebesar 3,892.

#### LANJUTAN LAMPIRAN 4.

Adapun koreksi tersebut di atas, dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan belum

1. Menetapkan struktur manajemen risiko;
2. Menerapkan proses manajemen risiko;
3. Mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan kompetensi untuk penerapan manajemen risiko,
4. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen risiko ke pihak-pihak terkait;
5. Mengevaluasi kebijakan dan implementasi serta tindak lanjutnya secara berkala terhadap sub unsur yang dinilai;
6. Menetapkan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons yang dilaksanakan secara konsisten;
7. Melakukan penilaian risiko korupsi;
8. Membuat rencana aksi dan tindak lanjut hasil penjaminan kualitas Penilaian Maturitas SPI oleh Inspektorat Jenderal.

Uraian lengkap hasil Penjaminan Kualitas terlampir pada Laporan Nomor: B.118/RC.200/G.6/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

Atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

  
INSPEKTUR JENDERAL  
Dr. Jan S. Maringa, S.H., M.H., CGCAE

**Tembusan:**

1. Menteri Pertanian RI, Jakarta
2. Wakil Menteri Pertanian RI, Jakarta







## LANJUTAN LAMPIRAN 5. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP ITJEN KEMENTAN

11	D.K.I.Jakarta Dabun Puzi 1	R.440/PW.110/G.411.2023 tanggal 14 November 2023	Audit Revisi	Laporan Hasil Revisi Refocusing Rancangan Direktori Jenderal Perkebunan TA 2023	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	
12	D.K.I.Jakarta Dabun Puzi 1	R.357/PW.140/G.072/023 tanggal 04 Juli 2023	Audit Revisi	Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Tinjauan UAPFAB Eselon 1 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Kehutanan TA 2023	-	-	0,00	12	-	-	0,00	10	-	-	0,00	2	
13	D.K.I.Jakarta Dabun Puzi 1	B-118/RD.200/G.50.8/023 tanggal 21 Agustus 2023	Audit Revisi	Laporan Hasil Perencanaan Kualitas etas Hasil Penelitian Mandiri Metafitas Penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	-	-	0,00	8	-	-	0,00	8	-	-	0,00	-	
14	D.K.I.Jakarta Dabun Puzi 1	R.404/PW.140/G.102/023 tanggal 30 Oktober 2023	Audit Revisi	Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Tinjauan UAPFAB Eselon 1 Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	-	-	0,00	16	-	-	0,00	15	-	-	0,00	1	
<b>JUMLAH</b>					-	-	0,00	86	-	-	0,00	90	-	-	0,00	6	
<b>TOTAL REKOMENDASI</b>								86				90				6	
<b>PRESENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASIDAN CAPAIAN</b>							TARGET LHP	90,00				84,74				106,28	
Keterangan :		(JML REKOMENDASI)					(JML REALISASI TL REKOM)										
Rumus Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi		x	100%		Rumus Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi		x	100%									
		(JML TL REKOMENDASI)					(JML TANGKAP TL REKOM)										

**LANJUTAN LAMPIRAN 6. NILAI KINERJA ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DJEN PERKEBUNAN**

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	99,96	99,91	99,82	100,00	20,00	100,00	<b>Sangat Baik</b>
2.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	97,30	99,99	85,18	100,00	20,00	100,00	<b>Sangat Baik</b>
3.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	97,05	99,64	98,91	100,00	16,20	90,50	<b>Sangat Baik</b>
4.	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	96,77	99,90	99,82	100,00	15,54	88,84	<b>Sangat Baik</b>
5.	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	96,41	82,63	98,51	100,00	17,71	94,27	<b>Sangat Baik</b>
6.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	95,34	99,80	98,32	100,00	13,93	84,83	<b>Sangat Baik</b>
7.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	95,23	80,99	87,83	100,00	19,01	97,52	<b>Sangat Baik</b>
8.	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	93,46	100,00	64,07	100,00	20,00	100,00	<b>Sangat Baik</b>
9.	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	93,02	99,91	74,07	100,00	16,85	92,12	<b>Sangat Baik</b>
10.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	91,73	94,94	57,23	100,00	20,00	100,00	<b>Sangat Baik</b>
11.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	89,36	93,22	97,06	100,00	6,78	66,96	<b>Baik</b>
12.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	89,33	100,00	41,35	100,00	20,00	100,00	<b>Baik</b>
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	89,32	92,02	92,79	100,00	7,98	69,95	<b>Baik</b>
14.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	89,18	94,23	99,52	100,00	5,77	64,42	<b>Baik</b>
15.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	88,83	94,81	99,57	100,00	5,19	62,99	<b>Baik</b>
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	88,82	92,48	91,63	100,00	7,52	68,80	<b>Baik</b>
17.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TOLI-TOLI	88,35	95,79	75,99	100,00	10,40	75,99	<b>Baik</b>
18.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	87,27	96,01	95,11	100,00	3,99	59,96	<b>Baik</b>
19.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	86,94	97,57	98,57	100,00	2,43	56,08	<b>Baik</b>

**LANJUTAN LAMPIRAN 6. NILAI KINERJA ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN**

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
20.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	86,94	97,23	97,41	100,00	2,77	56,92	Baik
21.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	86,92	97,29	97,53	100,00	2,71	56,77	Baik
22.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	86,88	96,65	95,09	100,00	3,35	58,38	Baik
23.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	86,84	96,46	94,24	100,00	3,54	58,85	Baik
24.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	86,82	97,95	97,78	100,00	2,40	56,01	Baik
25.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	86,80	95,53	90,87	100,00	4,47	61,17	Baik
26.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	86,80	98,97	94,79	100,00	3,01	57,51	Baik
27.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	86,75	98,03	99,08	100,00	1,97	54,92	Baik
28.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	86,67	96,91	94,79	100,00	3,09	57,74	Baik
29.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	86,50	96,94	94,03	100,00	3,06	57,65	Baik
30.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	86,40	98,35	94,04	100,00	2,72	56,80	Baik
31.	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	86,35	95,15	97,31	98,66	3,07	57,68	Baik
32.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	86,23	97,06	92,96	100,00	2,94	57,34	Baik
33.	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	86,09	99,33	99,90	100,00	0,67	51,67	Baik
34.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	86,02	99,04	98,47	100,00	0,96	52,41	Baik
35.	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	85,97	99,38	99,37	100,00	0,62	51,55	Baik
36.	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KOLAKA TIMUR	85,95	99,55	99,87	100,00	0,45	51,12	Baik
37.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	85,89	99,53	99,42	100,00	0,47	51,18	Baik
38.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	85,87	98,01	94,16	100,00	1,99	54,97	Baik

**LANJUTAN LAMPIRAN 6. NILAI KINERJA ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN**

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
39.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	85,85	99,74	99,98	100,00	0,26	50,64	<b>Baik</b>
40.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	85,74	99,64	99,02	100,00	0,36	50,90	<b>Baik</b>
41.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	85,70	100,00	100,00	100,00	-	50,00	<b>Baik</b>
42.	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	85,63	99,98	99,57	100,00	0,02	50,05	<b>Baik</b>
43.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	85,56	99,69	98,21	100,00	0,31	50,77	<b>Baik</b>
44.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	85,53	98,81	95,02	100,00	1,19	52,98	<b>Baik</b>
45.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	85,15	99,96	96,83	100,00	0,04	50,10	<b>Baik</b>
46.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	84,70	99,15	91,62	100,00	0,85	52,14	<b>Baik</b>
47.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	84,67	98,86	89,70	100,00	1,33	53,33	<b>Baik</b>
48.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	84,65	99,51	92,57	100,00	0,49	51,22	<b>Baik</b>
49.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	84,63	98,29	88,34	100,00	1,71	54,27	<b>Baik</b>
50.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	84,44	98,61	88,39	100,00	1,39	53,47	<b>Baik</b>
51.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	84,23	95,55	85,42	100,00	2,25	55,64	<b>Baik</b>
52.	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	83,95	94,76	72,58	100,00	5,24	63,10	<b>Baik</b>
53.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	82,90	95,44	69,13	100,00	4,56	61,40	<b>Baik</b>

**LANJUTAN LAMPIRAN 6. NILAI KINERJA ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN**

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
54.	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	82,73	98,88	79,88	100,00	1,12	52,79	<b>Baik</b>
55.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	82,66	96,83	84,53	98,01	1,33	53,32	<b>Baik</b>
56.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	82,18	100,00	80,66	100,00	-	50,00	<b>Baik</b>
57.	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	82,00	97,31	70,54	100,00	2,69	56,74	<b>Baik</b>
58.	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	81,56	100,00	77,23	100,00	-	50,00	<b>Baik</b>
59.	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	81,26	99,64	74,40	100,00	0,36	50,90	<b>Baik</b>
60.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	81,10	99,65	73,50	100,00	0,35	50,89	<b>Baik</b>
61.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	81,10	95,72	97,31	100,00	(5,17)	37,08	<b>Baik</b>
62.	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	81,06	99,28	71,60	100,00	0,84	52,09	<b>Baik</b>
63.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA UTARA	80,93	99,46	71,92	100,00	0,54	51,36	<b>Baik</b>
64.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	80,55	99,29	69,25	100,00	0,71	51,79	<b>Baik</b>
65.	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	80,55	99,95	71,50	100,00	0,05	50,13	<b>Baik</b>
66.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	80,09	98,93	65,53	100,00	1,07	52,68	<b>Baik</b>
67.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	79,86	99,40	65,87	100,00	0,60	51,49	<b>Cukup</b>
68.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	78,80	98,05	55,46	100,00	1,95	54,87	<b>Cukup</b>
69.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	78,75	95,35	50,62	99,19	3,97	59,92	<b>Cukup</b>
70.	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	78,11	98,61	53,61	100,00	1,39	53,47	<b>Cukup</b>
71.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	77,66	100,00	55,84	100,00	-	50,00	<b>Cukup</b>

**LANJUTAN LAMPIRAN 6. NILAI KINERJA ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN**

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
72.	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	76,62	91,88	22,58	100,00	8,12	70,29	<b>Cukup</b>
73.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	73,21	95,02	91,55	82,86	(4,21)	39,47	<b>Cukup</b>
74.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	72,73	94,12	98,54	86,93	(9,02)	27,44	<b>Cukup</b>
75.	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	67,93	98,81	76,15	69,04	0,21	50,53	<b>Cukup</b>
76.	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	33,81	99,10	99,93	13,82	(20,00)	-	<b>Sangat Kurang</b>
77.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	30,12	97,96	96,59	6,99	(20,00)	-	<b>Sangat Kurang</b>
78.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	25,20	97,82	83,93	1,00	(20,00)	-	<b>Sangat Kurang</b>
79.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	21,37	98,28	62,62	1,00	(20,00)	-	<b>Sangat Kurang</b>

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien						
1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,58	32,62	32,72	32,75	32,91
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program	Kegiatan	3	3	3	3	3
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran	Kegiatan	3	3	3	3	3
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama	Kegiatan	2	2	2	2	2
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi	Kegiatan	2	2	2	2	2

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan	3	3	3	3	3
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan	Kegiatan	6	6	6	6	6
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	4	4	4	4
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Umum yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Umum	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kegiatan	4	4	4	4	4

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi	Kegiatan	2	2	2	2	2
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan	Kegiatan	9	9	9	9	9
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kegiatan	5	5	5	5	5
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	Kegiatan	5	5	5	5	5

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
2	<b>Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan</b>	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Perencanaan	%	81	81	81	81	82
	Tingkat Pemenuhan layanan Sub Kelompok Program	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Anggaran	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Kerjasama	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	82	83	83,7	84,3	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Data dan Informasi	%	81	81	82	82	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	%	84	85	86	87	88
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Keuangan	%	82	82	82,7	82,7	83
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perbendaharaan	%	82	82	83	83	83
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	82	82	82	82	82
	Tingkat pemenuhan layanan Bagian Umum	%	83	83	84	84	85

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	%	84	84	85	86	87
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Layanan Rekomendasi	%	81	82	83	84	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perlengkapan	%	82	82	83	83	84
	Tingkat Pemenuhan Layanan Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas						
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	%	82	82	83	83	84
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	%	82	82	83	84	85
<b>3</b>	<b>Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan</b>	Level		3	3	3	4
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4
<b>4</b>	<b>Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan</b>	%		75	80	85	85
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85
5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
6	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	
7	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya yang diberikan</b>	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	
8	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon yang diberikan</b>	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	
9	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak yang diberikan</b>	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	
	Tingkat kepuasan layanan ASN BPTP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	
<b>SK 2</b>	<b>Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas</b>							
1	<b>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan</b>	Nilai	85	85	85	85	85	
	Rasio rekomendasi hasil money (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	Nilai	85	85	85	85	85	

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rekomendasi hasil money (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti	Kegiatan	6	6	6	6	6
<b>SK 3</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang efektif, efisien dan akuntabel</b>						
<b>1</b>	<b>Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar</b>	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
<b>SK 4</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>						
<b>1</b>	<b>Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan</b>	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	
SK 5	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5
			Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5
SK 6	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5
			Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5

**LANJUTAN LAMPIRAN 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 7	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5

**LAMPIRAN 8.** REKAP SURVEY KEPUASAN LAYANAN DITJEN. PERKEBUNAN

Layanan	Persentase	Jumlah Responden
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	29,5%	46
Layanan BMN	14,1%	22
Layanan Hukum	16,7%	26
Layanan Hubungan Masyarakat	9,6%	15
Layanan Organisasi & Tata Kelola Internal	35,9%	56
Layanan Umum	25,6%	40
Layanan Data dan Informasi	30,8%	48
Layanan Perkantoran	30,1%	47
<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	46,2%	72
Layanan Sarana Internal	22,4%	35
Layanan Prasarana Internal	19,2%	30
<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	39,1%	61
Layanan Manajemen SDM	34,0%	53
Layanan Pengembangan SDM	55,1%	86
<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	19,2%	30
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21,2%	33
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16,7%	26
Layanan Manajemen Keuangan	17,3%	27
Layanan Penyelenggara Kearsipan	25,6%	40

**LAMPIRAN 9. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
<b>Ditjen. Perkebunan</b>				<b>930.256.994.922</b>	<b>90,24</b>	<b>16.527.479.000</b>
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>				<b>748.616.441.643</b>	<b>88,70</b>	<b>16.477.479.000</b>
<b>Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar</b>				<b>251.921.387.073</b>	<b>97,04</b>	-
<b>Koordinasi</b>				<b>1.499.680.000</b>		-
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15	100,00	Kegiatan	1.499.680.000	99,98	-
<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>				<b>10.366.652.226</b>		-
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	9	100,00	NSPK	10.366.652.226	94,22	
<b>Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>5.112.578.616</b>		-
Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	350	100,00	Ha	5.112.578.616	97,28	-
<b>Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>234.942.476.231</b>		-
Kawasan Kopi	11.301	99,21	Ha	103.542.612.165	97,82	
Kawasan Kakao	6.326	99,62	Ha	35.651.352.813	98,85	
Kawasan Karet	1.700	100,00	Ha	12.157.354.503	97,97	
Kawasan Kelapa	11.708	98,79	Ha	68.994.327.000	96,00	
Kawasan Sagu	900	100,00	Ha	4.594.591.100	99,60	
Kawasan Jambu Mete	3.980	91,92	Ha	9.877.785.300	90,59	
Kawasan Pinang	1	100,00	Ha	124.453.350	96,70	
<b>Penguatan Perlindungan Perkebunan</b>				<b>69.057.871.969</b>	<b>98,80</b>	-
<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>				<b>2.648.535.536</b>		-
Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	14	100,00	Rekomendasi Teknologi	2.648.535.536	97,63	-
<b>Koordinasi</b>				<b>4.345.689.953</b>		-
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	44	100,00	Kegiatan	4.345.689.953	99,48	-

**LANJUTAN LAMPIRAN 9. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>				<b>7.177.403.280</b>		-
Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	100,00	NSPK	7.177.403.280	99,24	-
<b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>				<b>10.811.498.998</b>		-
Perangkat Perlindungan Perkebunan	61	100,00	Unit	4.627.385.550	99,38	-
Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	11	100,00	Paket Teknologi	6.184.113.448	98,26	-
<b>Sertifikasi Produk</b>				<b>5.568.237.202</b>		-
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	44	100,00	Desa	5.568.237.202	99,12	-
<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>				-		-
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan			Kasus	-		-
<b>Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>38.506.507.000</b>		-
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	272	100,00	Ha	15.093.657.947	97,59	-
Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	3.325	100,00	Ha	23.412.849.053	99,42	-
<b>Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah</b>				<b>90.423.330.143</b>	<b>96,93</b>	-
<b>Koordinasi</b>				<b>899.028.227</b>		
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	9	100,00	Kegiatan	899.028.227	99,89	
<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>				<b>7.816.304.730</b>		
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6	100,00	NSPK	7.816.304.730	92,50	
<b>Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>5.931.315.988</b>		
Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	416	100,00	Ha	5.931.315.988	96,46	

**LANJUTAN LAMPIRAN 9. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
<b>Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>75.776.681.198</b>		
Kawasan Lada	500	100,00	Ha	5.215.402.165	90,97	
Kawasan Pala	12.475	100,00	Ha	24.523.444.510	99,37	
Kawasan Cengkeh	4.850	100,00	Ha	8.790.129.255	98,51	
Kawasan Tebu	4.700	100,00	Ha	32.572.410.090	96,83	
Kawasan Vanili	47	100,00	Ha	4.675.295.178	97,14	
<b>Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan</b>				<b>179.383.664.533</b>	<b>99,12</b>	-
<b>Standarisasi Produk</b>				<b>1.628.065.257</b>		-
Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	629	100,00	Surat	1.628.065.257	96,07	-
<b>Koordinasi</b>				<b>12.562.581.690</b>		-
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	109	100,00	Kegiatan	12.562.581.690	97,93	-
<b>Promosi</b>				<b>1.923.695.638</b>		-
Promosi Produk Hasil Perkebunan	16	100,00	Promosi	1.923.695.638	98,62	-
<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>				<b>14.243.253.059</b>		-
Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	100,00	NSPK	14.243.253.059	98,26	-
<b>Standarisasi Produk</b>				<b>11.753.451.181</b>		-
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	16.352	93,76	STDB	11.753.451.181	98,27	-
<b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>				<b>93.490.562.023</b>		-
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	19	100,00	Unit	7.854.839.357	97,45	-
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	46	100,00	Unit	85.635.722.666	99,49	-
<b>Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>				<b>43.782.055.685</b>		-

**LANJUTAN LAMPIRAN 9. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	17	100,00	Unit	3.677.529.125	98,65	-
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	16	100,00	Unit	40.104.526.560	99,79	-
<b>Penguatan Perbenihan Perkebunan</b>				<b>157.830.187.925</b>	<b>65,70</b>	<b>16.477.479.000</b>
<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>				<b>4.895.358.216</b>		
Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	155	100,00	Rekomendasi Kebijakan	4.895.358.216	96,51	
<b>Koordinasi</b>				<b>2.896.303.366</b>		
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	29	100,00	Kegiatan	2.896.303.366	99,87	
<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>				<b>9.847.374.951</b>		
Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	100,00	NSPK	9.847.374.951	96,72	
<b>Penyidikan dan Pengujian Produk</b>				<b>6.320.912.834</b>		
Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	41.659.600	100,00	Batang	4.202.642.080	97,14	
Pengujian Mutu Benih	12.589.740	100,00	Batang	2.118.270.754	91,49	
<b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>				<b>72.309.308.000</b>		
Sarana Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	100,00	Unit	72.309.308.000	100,47	
<b>Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>15.520.103.211</b>		
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	858	100,00	Ha	15.520.103.211	90,93	
<b>Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>				<b>46.040.827.347</b>		<b>16.477.479.000</b>
Nursery	14	100,00	Unit	20.969.134.150	88,90	
Nursery Modern - SBSN	1	50,00	Unit	2.480.777.000	3,19	16.477.479.000
Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	100,00	Unit	22.590.916.197	90,26	-

**LANJUTAN LAMPIRAN 9. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				<b>181.640.553.279</b>	<b>97,20</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan</b>				<b>181.640.553.279</b>	<b>97,20</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>				<b>115.905.986.497</b>		-
Layanan BMN	5	100,00	Layanan	7.097.048.015	99,59	
Layanan Hukum	2	100,00	Layanan	3.971.528.925	97,82	
Layanan Hubungan Masyarakat	1	100,00	Layanan	5.258.270.648	99,21	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	100,00	Layanan	554.392.572	97,15	
Layanan Umum	5	100,00	Layanan	21.528.540.248	94,83	
Layanan Data dan Informasi	1	100,00	Layanan	3.875.508.891	98,03	
Layanan Perkantoran	5	100,00	Layanan	73.620.697.198	96,55	
<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>				<b>2.855.136.580</b>		<b>50.000.000</b>
Layanan Sarana Internal	1	100,00	Unit	1.453.551.050	96,15	50.000.000
Layanan Prasarana Internal	2	100,00	Unit	1.401.585.530	95,60	-
<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>				<b>4.004.728.201</b>		-
Layanan Manajemen SDM	840	100,00	Orang	4.004.728.201	97,73	-
<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>				<b>58.874.702.001</b>		-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80	100,00	Dokumen	44.186.281.462	98,70	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	100,00	Dokumen	5.528.392.618	95,12	-
Layanan Manajemen Keuangan	5	100,00	Dokumen	8.509.015.898	99,55	-
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	100,00	Layanan	651.012.023	91,86	-

**LAMPIRAN 10. TIM PENYUSUN LAKIN**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO, RM NOMOR 2  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12552  
TELEPON (021) 7815290 - 4, FAKSIMILI (021) 7815494 - 7614888  
WEBSITE : <http://dipertanian.pertanian.go.id>

**SURAT TUGAS**

Nomor : 15441/OT.050/E.1/11/2023

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022;
  3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022;
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA - 018.05.1.238830/2023 tanggal 1 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada:

No	Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Adi Cahyono, SE, M.Sc	IV	Arsiparis Muda	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
2	Akhid Nur Khoirudin, ST, M.Si	III	Analisis Anggaran Muda	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
3	Andi Muhammad Ilham	III	Pengevaluasi Rencana	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
4	Mutia Nailil Muna, SP	III	Analisis Data dan Informasi	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
5	Ahmad Faiz Farqolith, S.Pt.	III	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
6	R. Melly Mulyasari, SE, MM.	IV	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Bagian Umum
7	Enny Siswanti, SH, MM.	III	Bendahara Penerima	Bagian Umum
8	Yhanuar Ardhi Wiedanto, S.Psi	III	Analisis Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Umum
9	Dini Ariani Putri, S.Sos	III	Pranata Humas Muda	Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat
10	Dwi Setyawati Putri, SE	III	Perencana Pertama	Kelompok Perencanaan
11	Faisal Anugrah Widiatama, SE	III	Perencana Pertama	Kelompok Perencanaan
12	Sariono, SE	III	Analisis Tindak Lanjut LHP	Kelompok Keuangan dan BMN

Document ini telah ditandatangani secara elektronik yang ditandatangani oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## LANJUTAN LAMPIRAN 10. TIM PENYUSUN LAKIN

Untuk: Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023. Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023
2. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 kepada Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan
3. Mengkompilasi, mengolah, dan menganalisis data capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023

Surat penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat penugasan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 November 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.  
NIP 197204121999031004

### Tembusan :

1. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

# **KALEIDOSKOP**



RAKERNAS PEMBANGUNAN  
PERKEBUNAN,  
BOGOR 26 JANUARI 2023





RAKORNAS PERBENIHAN  
PERKEBUNAN 2023, MAKASSAR  
16-18 MARET 2023





PERTEMUAN MONEV SEMESTER I, JAKARTA 2-4 AGUSTUS 2023





BIMTEK KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN DALAM RANGKA MONEV IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI , BOGOR 13-15 SEPTEMBER





PERTEMUAN INTERNATIONAL TRIPARTITE  
RUBBER COUNCIL (ITRC) KE-38 DAN  
RELATED MEETINGS, PUTRAJAYA MALAYSIA  
18-22 SEPTEMBER 2023





INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO) KE-136 DAN PERTEMUAN ICO BENGALURU, INDIA 25-29 SEPTEMBER





PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 18 NOVEMBER 2023





RAPAT OPTIMALISASI ANGGARAN DAN PERCEPATAN REALISASI TW 4 DITJENBUN, BOGOR 6 NOVEMBER 2023





RAPAT EVALUASI RPJMN 2020-2024 DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN-MAKASAR 14 DESEMBER





**Kantor Pusat Kementerian Pertanian**

Jl. Harsono RM No.3 Gedung C,  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Telp. : (021) 7815380 -4

Fax : (021) 7815486-7815586

Email : [difjenbun@pertanian.go.id](mailto:difjenbun@pertanian.go.id)